REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Dasar Hukum	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir	Sumber Data
									2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis	Jumlah Konflik	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah Konflik	1. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor :9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat 2. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kejadian	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Laporan Program/Kegiatan Seksi BKBD Kesbangpol : 1. **Program Kerukunan Umat Beragama;** - Survei Index Kerukunan Umat Beragama - Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama - Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan - Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot
		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik	(Jumlah Potensi Konflik yang tertangani /Jumlah Potensi Konflik) x 100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Program/Kegiatan Seksi BKBD dan Tahmas Kesbangpol : 1. **Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan;** - Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan; - Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara; - Jambore Kebangsaan - Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental;

					Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21										- Pembentukan Model Kelurahan Pembauran Kebangsaan; - Kemah Pembauran Kebangsaan; - Peningkatan Karakter Bangsa; - Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara; - Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkoba (HANI). 2. **Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya;** - Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA; - Tes Narkoba bagi Aparatur; - Pembentukan Kader Pencegahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkotika; - Satgas Narkotika; - Desa Bersinar; - Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; - Perda Narkotika. 3. **Program Kewaspadaan Nasional;** - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM; - Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah; - Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan; - Pemantauan Orang Asing; - Penanganan Konflik Sosial; - Bimbingan Teknis Intelijen; - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA[); - Penyelenggaraan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah; - Penanganan Ancaman,

					Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah. 11. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik										Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES; - Penyelenggraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin).
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, Pilkada dan Pilkades	Meningkatnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, Pilkada dan Pilkades	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik 2. Undang - undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik	(Jumlah Suara Sah+Jumlah Suara Tidak Sah)/Jumlah DPT x 100%	Persen	80,60%	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65 %	80,65%	Laporan Program/Kegiatan Seksi HAL Kesbangpol dan Tim Perkembangan Politik Daerah : 1. **Program Pendidikan Politik Masyarakat;** - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik; - Kemitraan Partai Politik; - Stabilitasi Politik Daerah; - Penyelenggaraan Pendidikan Politik; - Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila; - Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum

					Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18) 5. Permendagri 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan keuangan partai politik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah 7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggraan Pendididkan Politik 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi										

					Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 9. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik										
				Persentase Ormas yang dibina kategori aktif	1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP pengganti undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang – undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang – undang; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 3. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	jumlah ormas Aktif / jumlah ormas yang di bina x 100%	Persen	35,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Program/Kegiatan Seksi Tahmas dan Forum Ormas Sumedang : 1. **Program Pendidikan Politik Masyarakat;** - Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat; - Pelayanan Organisasi Masyarakat; - Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

					2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial; 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan 10. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural										

					pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik										

Sumedang, 31 Desember 2020

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KANTOR KESBANG POL

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001